

APBN 2026

— sebagai —

Shock Absorber:

Seberapa Kuat Menahan Guncangan Eksternal?



Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: APBN 2026 sebagai Shock Absorber: Seberapa
Kuat Menahan Guncangan Eksternal*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

1 April 2026

APBN 2026 SEBAGAI SHOCK ABSORBER: SEBERAPA KUAT MENAHAN GUNCANGAN EKSTERNAL

Abstrak

Makalah ini membahas peran **APBN 2026** sebagai *shock absorber* dalam menghadapi guncangan eksternal yang pada awal 2026 terutama datang dari volatilitas harga energi, ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, tekanan nilai tukar, dan perubahan sentimen pasar keuangan global. Secara postur, APBN 2026 didesain ekspansif tetapi tetap dalam batas yang dinilai terukur, dengan pendapatan negara sebesar **Rp3.153,6 triliun**, belanja negara **Rp3.842,7 triliun**, dan defisit **Rp689,1 triliun** atau **2,68 persen terhadap PDB**. Sampai 28 Februari 2026, realisasi pendapatan negara mencapai **Rp358,0 triliun**, belanja negara **Rp493,8 triliun**, dan defisit **Rp135,7 triliun** atau **0,53 persen terhadap PDB**. Di sisi lain, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup baik, yaitu **5,11 persen** pada 2025, neraca perdagangan Januari 2026 tetap surplus **US\$0,95 miliar**, dan cadangan devisa akhir Februari 2026 tetap tinggi setara **6,1 bulan impor**. Namun, tekanan eksternal tetap nyata karena rupiah melemah ke sekitar **Rp16.985 per dolar AS** pada pertengahan Maret 2026, inflasi Februari 2026 naik menjadi **4,76 persen** secara tahunan, dan Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate di **4,75 persen** demi menjaga stabilitas. Makalah ini berargumen bahwa kekuatan APBN 2026 sebagai *shock absorber* terletak pada empat hal: ruang defisit yang masih terkendali, kapasitas belanja penyangga melalui subsidi, kompensasi, dan bansos, manajemen pembiayaan yang prudent, serta sinergi fiskal-moneter. Akan tetapi,

kekuatan tersebut tidak tanpa batas. APBN tetap rentan terhadap lonjakan harga minyak, depresiasi rupiah, kenaikan biaya bunga utang, tekanan terhadap PNB dan perpajakan, serta risiko kebocoran dan inefisiensi belanja. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan "seberapa kuat" bukanlah "tanpa batas", melainkan **cukup kuat untuk meredam guncangan jangka pendek dan menjaga stabilitas, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas targeting, efisiensi pembiayaan, dan disiplin reformasi struktural.**

Kata kunci: APBN 2026, shock absorber, fiskal, guncangan eksternal, subsidi energi, defisit anggaran, stabilisasi ekonomi, Indonesia

APBN 2026 sebagai Shock Absorber: Seberapa Kuat Menahan Guncangan Eksternal

Pendahuluan

Dalam ekonomi terbuka seperti Indonesia, guncangan eksternal hampir selalu datang melalui beberapa saluran sekaligus: perdagangan, harga komoditas, nilai tukar, pasar surat utang, dan ekspektasi pelaku ekonomi. Pada awal 2026, tekanan tersebut menjadi semakin relevan karena Bank Indonesia menilai perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek ekonomi global, meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan, dan menekan nilai tukar rupiah. Pada 16 Maret 2026, rupiah berada di kisaran **Rp16.985 per dolar AS**, melemah **1,29 persen** dibanding posisi akhir Februari 2026, sementara pada Maret 2026 investasi portofolio tercatat mengalami *net outflows* sekitar **US\$1,1 miliar**. Dalam konteks semacam ini, APBN tidak lagi sekadar dokumen tahunan negara, melainkan instrumen utama untuk menahan transmisi guncangan global ke ekonomi domestik. ([Bank Indonesia](#))

Rudy C Tarumingkeng: **APBN 2026 sebagai Shock Absorber: Seberapa Kuat Menahan Guncangan Eksternal**

Secara konseptual, istilah *shock absorber* merujuk pada kemampuan kebijakan fiskal untuk menyerap, meredam, atau memperlambat dampak guncangan eksternal agar tidak langsung berubah menjadi kontraksi tajam pada konsumsi, produksi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rumah tangga. Fungsi ini dapat bekerja melalui banyak instrumen: subsidi energi, kompensasi harga, bantuan sosial, transfer ke daerah, percepatan belanja pemerintah, stabilisasi pasokan pangan, serta pembiayaan defisit yang tetap kredibel. Kementerian Keuangan sendiri secara eksplisit menyebutkan bahwa pada periode tekanan harga minyak, pemerintah menjalankan tiga strategi, yaitu *shock absorber* fiskal melalui subsidi dan kompensasi energi, perlindungan sosial melalui BLT dan bansos tambahan, serta penyesuaian harga domestik secara terukur untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

([Kemenkeu Media](#))

Pertanyaan pentingnya adalah: **seberapa kuat APBN 2026 menjalankan fungsi itu?** Pertanyaan ini penting karena Indonesia memasuki 2026 bukan dalam situasi krisis, tetapi juga bukan dalam kondisi tanpa risiko. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh **5,11 persen** pada 2025, lebih tinggi dari 2024; neraca perdagangan Januari 2026 masih surplus **US\$0,95 miliar**; dan keyakinan konsumen Februari 2026 tetap optimistis. Namun, inflasi Februari 2026 naik menjadi **4,76 persen** secara tahunan, BI tetap berhati-hati menjaga rupiah, dan berbagai indikator menunjukkan bahwa volatilitas global belum mereda. Maka, APBN 2026 perlu dibaca bukan hanya sebagai alat ekspansi pembangunan, tetapi juga sebagai pagar stabilitas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini berpendapat bahwa APBN 2026 **cukup kuat** sebagai *shock absorber* untuk meredam guncangan jangka pendek, menjaga daya beli, dan mempertahankan momentum ekonomi, tetapi kekuatannya bersifat **bersyarat**. Ia efektif bila guncangan masih berada pada rentang yang dapat dikelola, bila pembiayaan tetap efisien, dan bila belanja penyangga tepat sasaran. Sebaliknya, bila terjadi lonjakan minyak yang berkepanjangan, pelemahan rupiah yang lebih dalam, atau penurunan

tajam pada penerimaan negara, maka kapasitas APBN akan menghadapi batas yang lebih nyata. Dengan demikian, kekuatan APBN 2026 harus dianalisis secara berimbang: melihat fondasi yang kuat sekaligus mengakui keterbatasannya.

Kerangka Konseptual: APBN sebagai Penyangga Siklus dan Penjaga Stabilitas

Secara teoritis, APBN menjalankan sedikitnya tiga fungsi dalam menghadapi guncangan: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi bekerja ketika negara membiayai barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan pasar secara memadai; fungsi distribusi bekerja ketika negara mengoreksi ketimpangan melalui transfer, subsidi, dan perlindungan sosial; sedangkan fungsi stabilisasi bekerja ketika anggaran dipakai untuk mengurangi gejolak siklus ekonomi. Dalam konteks guncangan eksternal, fungsi stabilisasi menjadi sangat sentral karena ekonomi domestik memerlukan bantalan ketika harga energi melonjak, suku bunga global mengeras, atau permintaan global melemah. Kerangka RAPBN 2026 sendiri secara eksplisit menyebut kebijakan fiskal yang **countercyclical**, ekspansif, sehat, tetapi tetap terarah dan terukur.

Dalam praktiknya, kekuatan APBN sebagai *shock absorber* ditentukan oleh lima unsur. Pertama, **ruang fiskal**, yakni apakah pendapatan, defisit, dan pembiayaan masih berada pada batas aman. Kedua, **komposisi belanja**, yakni apakah belanja benar-benar dapat menahan tekanan pada rumah tangga, sektor usaha, dan pemerintah daerah. Ketiga, **fleksibilitas pembiayaan**, yakni apakah negara masih dapat membiayai defisit dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali. Keempat, **ketahanan eksternal**, karena APBN tidak bekerja sendirian, melainkan ditopang oleh neraca pembayaran, cadangan devisa, dan stabilitas pasar SBN. Kelima, **kualitas institusional**, yaitu kemampuan pemerintah menargetkan subsidi, menyalurkan bansos, dan mengendalikan kebocoran anggaran. Kelima

unsur itu menjadi ukuran yang tepat untuk menilai APBN 2026. ([Kemenkeu Media](#))

Di Indonesia, pembacaan tentang *shock absorber* tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi yang masih sensitif terhadap harga energi, pangan, dan kurs. Nota Keuangan RAPBN 2026 menegaskan bahwa perubahan nilai tukar rupiah memengaruhi penerimaan perpajakan impor, PPN impor, PPnBM impor, PPh migas, PNBP SDA migas, pembayaran bunga utang, subsidi energi, hingga penarikan dan cicilan pinjaman luar negeri. Nota yang sama juga menegaskan bahwa kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) secara langsung dapat menaikkan subsidi energi dan mengubah postur APBN. Artinya, APBN Indonesia memang bekerja dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi faktor global; karena itu kekuatan *shock absorber* harus diukur dari kemampuannya menghadapi tekanan pada pos-pos yang paling sensitif tersebut. ([Kemenkeu Media](#))

Postur APBN 2026: Ekspansif, tetapi Tetap Dijaga dalam Koridor

Dari sisi desain, APBN 2026 memang mengandung watak ekspansif. Dalam RAPBN, pendapatan negara direncanakan sebesar **Rp3.147,7 triliun**, belanja negara **Rp3.786,5 triliun**, dan defisit **Rp638,8 triliun** atau **2,48 persen terhadap PDB**. Nota Keuangan menyebut postur ini sebagai ekspansif dan sehat, dengan tujuan memberi respons atas dinamika global sekaligus menjaga perekonomian domestik. Namun setelah penetapan APBN, posturnya menjadi lebih besar: berdasarkan APBN 2026 yang termuat dalam APBN Kita Februari 2026, pendapatan negara tercatat **Rp3.153,6 triliun**, belanja negara **Rp3.842,7 triliun**, dan defisit **Rp689,1 triliun** atau **2,68 persen terhadap PDB**, dengan pembiayaan anggaran sebesar **Rp689,1 triliun**. Ini menunjukkan bahwa negara menyediakan bantalan fiskal yang lebih tebal daripada rancangan awal, namun masih berada di bawah batas legal 3 persen PDB.

Bila dilihat sampai 28 Februari 2026, APBN juga belum menunjukkan gejala tekanan yang mengkhawatirkan. Realisasi pendapatan negara mencapai

Rp358,0 triliun atau **11,4 persen** dari target APBN, tumbuh **12,8 persen** secara tahunan. Penerimaan perpajakan mencapai **Rp290,0 triliun**, dengan penerimaan pajak tumbuh **30,4 persen** secara tahunan. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai **Rp493,8 triliun** atau **12,8 persen** dari pagu, tumbuh **41,9 persen** secara tahunan. Defisit anggaran sampai akhir Februari berada pada **Rp135,7 triliun** atau **0,53 persen terhadap PDB**. Data ini memperlihatkan dua hal sekaligus: pertama, APBN bekerja cepat dari sisi belanja; kedua, pendapatan negara pada awal tahun masih cukup kuat untuk menopang ekspansi tersebut.

Kekuatan awal APBN 2026 juga tampak dari pembiayaan anggarannya. Sampai akhir Februari 2026, realisasi pembiayaan anggaran mencapai **Rp164,2 triliun** atau **23,8 persen** dari target APBN. Komponen pembiayaan utang mencapai **Rp185,3 triliun**, sedangkan pembiayaan nonutang tercatat negatif **Rp21,1 triliun**. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pembiayaan APBN 2026 dikelola secara prudent dan terukur, mempertimbangkan likuiditas pemerintah dan dinamika pasar keuangan; pemenuhan pembiayaan utang dinyatakan tetap *on-track* melalui langkah antisipatif dan *active cash & debt management*; dan pemenuhan target pembiayaan mempertimbangkan *cost of fund* yang efisien dan risiko yang termitigasi. Dalam penilaian fiskal, pernyataan semacam ini penting karena efektivitas APBN sebagai *shock absorber* bukan hanya soal besarnya defisit, tetapi juga apakah defisit itu dapat dibiayai tanpa merusak kredibilitas. ([Kemenkeu Media](#))

Lingkungan Eksternal Awal 2026: Mengapa APBN Harus Siap Menyerap Guncangan?

Untuk menilai kekuatan APBN 2026, perlu terlebih dahulu dipahami jenis guncangan yang dihadapi. Bank Indonesia pada Maret 2026 menegaskan bahwa perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek ekonomi global. Dalam asesmen BI, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 masih diperkirakan berada di kisaran **4,9–5,7 persen**, tetapi kestabilan

Rudy C Tarumingkeng: **APBN 2026 sebagai Shock Absorber: Seberapa Kuat Menahan Guncangan Eksternal**

rupiah dan neraca pembayaran perlu terus diperkuat. Di saat yang sama, aliran modal dan finansial Januari–Februari 2026 masih mencatat *net inflows* **US\$1,6 miliar**, namun pada Maret 2026 investasi portofolio berbalik mengalami *net outflows* **US\$1,1 miliar**. Pola ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal tetap sangat cair: arus modal masih bisa masuk, tetapi sewaktu-waktu juga bisa berbalik karena sentimen geopolitik dan risiko global. ([Bank Indonesia](#))

Risiko eksternal itu bukan sekadar abstraksi. Nota Keuangan RAPBN 2026 menempatkan nilai tukar, harga minyak mentah Indonesia, lifting migas, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebagai variabel kunci yang dapat mengubah postur APBN. Dalam lampiran asumsi dasar ekonomi makro 2026, pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi **5,4 persen**, inflasi **2,5 persen**, nilai tukar **Rp16.500 per dolar AS**, suku bunga SBN 10 tahun **6,9 persen**, ICP **US\$70 per barel**, lifting minyak **610 ribu barel per hari**, dan lifting gas **984 ribu barel setara minyak per hari**. Asumsi-asumsi ini dapat dibaca sebagai titik keseimbangan fiskal: selama realitas ekonomi bergerak di sekitar asumsi itu, APBN relatif aman; tetapi bila penyimpangan membesar, tekanan APBN juga akan membesar. ([Kemenkeu Media](#))

Indikator terkini memperlihatkan bahwa sebagian risiko itu sudah mulai bergerak. Inflasi Februari 2026 tercatat **4,76 persen** secara tahunan, di atas sasaran **2,5±1 persen**, meski BI menilai kenaikan itu terutama dipengaruhi faktor temporer *base effect* diskon tarif listrik 2025. Rupiah melemah, dan BI mempertahankan BI-Rate **4,75 persen** pada Februari maupun Maret 2026 untuk menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga sasaran inflasi. Di sisi eksternal, cadangan devisa akhir Februari 2026 tetap tinggi dan setara **6,1 bulan impor**, sehingga memberi bantalan terhadap gejolak, sedangkan neraca perdagangan Januari 2026 masih surplus **US\$0,95 miliar**. Kombinasi indikator ini memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia belum rapuh, tetapi memang menghadapi tekanan yang cukup nyata untuk memerlukan bantalan fiskal yang aktif. ([Bank Indonesia](#))

Mekanisme Kerja APBN 2026 sebagai Shock Absorber

1. Menahan gejolak harga melalui subsidi dan kompensasi

Saluran pertama dan paling langsung adalah **subsidi dan kompensasi**. Dalam APBN Kita Februari 2026, Kementerian Keuangan menyatakan secara tegas bahwa APBN berperan sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga energi global. Sampai 28 Februari 2026, realisasi belanja subsidi dan kompensasi mencapai **Rp51,5 triliun**. Dokumen yang sama menegaskan bahwa realisasi ini dipengaruhi fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, dan peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik. Dengan kata lain, ketika harga energi global dan kurs bergerak tidak menguntungkan, APBN menyerap sebagian tekanan itu agar tidak seluruhnya dialihkan ke rumah tangga dan dunia usaha.

([Kemenkeu Media](#))

Secara naratif, fungsi ini dapat dijelaskan sederhana. Bila harga minyak dunia naik, pemerintah memiliki dua pilihan ekstrem: membiarkan harga domestik langsung melonjak atau menyerap sebagian kenaikan melalui anggaran. Pilihan pertama cepat menjaga fiskal, tetapi berisiko mendorong inflasi, menekan daya beli, dan mengganggu kegiatan usaha. Pilihan kedua menjaga stabilitas sosial-ekonomi, tetapi membebani anggaran. Indonesia pada 2026 jelas memilih jalur tengah: penyesuaian dilakukan terukur, sementara APBN tetap dipakai sebagai peredam. Pendekatan ini konsisten dengan *lesson learned* yang juga dituliskan Kemenkeu, yakni kombinasi *shock absorber* fiskal, perlindungan sosial, dan penyesuaian harga domestik secara terukur. ([Kemenkeu Media](#))

Ukuran konkret dari mekanisme ini terlihat pada volume barang dan layanan bersubsidi yang tetap dijaga. Sampai akhir Februari 2026, realisasi BBM bersubsidi tercatat **1.647,9 ribu KL**, LPG 3 kg **740,9 juta kg**, listrik bersubsidi menjangkau **42,7 juta pelanggan**, pupuk bersubsidi **1,4 juta ton**, dan debitur KUR **0,8 juta debitur**. Data ini menunjukkan bahwa APBN bukan hanya membayar angka di atas kertas, melainkan menerjemahkan

bantalan fiskal menjadi pasokan riil yang dapat dirasakan oleh rumah tangga, petani, pelaku UMKM, dan sektor produktif lain. Dalam ekonomi politik anggaran, inilah bentuk paling nyata dari *shock absorber*: menjaga agar harga dan akses tidak sepenuhnya mengikuti turbulensi global. ([Kemenkeu Media](#))

2. Melindungi konsumsi rumah tangga melalui bansos dan transfer langsung

Saluran kedua adalah **perlindungan sosial**. Sampai akhir Februari 2026, realisasi belanja bansos mencapai **Rp27,0 triliun**. Dalam rincian APBN Kita, program yang dibiayai antara lain **PBI JKN Rp7,7 triliun untuk 96,7 juta peserta, PKH Rp7,0 triliun untuk 9,4 juta KPM, Kartu Sembako Rp10,0 triliun untuk 16,7 juta KPM, dan KIP Kuliah Rp2,0 triliun untuk 175,8 ribu mahasiswa**. Selain itu, tunjangan hari raya telah disalurkan **Rp24,7 triliun** per 10 Maret 2026 dengan target sekitar **6 juta penerima**. Ini penting karena ketika guncangan eksternal menekan harga dan sentimen, konsumsi rumah tangga kelas bawah dan menengah bawah menjadi sektor pertama yang perlu dipertahankan. ([Kemenkeu Media](#))

Dari perspektif makro, bansos adalah alat yang sangat strategis karena ia bekerja cepat terhadap konsumsi. Rumah tangga berpendapatan rendah cenderung membelanjakan sebagian besar tambahan pendapatan yang diterimanya; karena itu transfer sosial memiliki *multiplier* yang relatif kuat untuk menopang permintaan domestik. Di Indonesia, konsumsi rumah tangga tetap menjadi jangkar utama pertumbuhan. Ketika ekonomi 2025 tumbuh **5,11 persen**, salah satu alasan Indonesia tidak mudah terguncang adalah karena permintaan domestik tetap bergerak. Maka, perlindungan sosial bukan hanya instrumen kesejahteraan, melainkan juga instrumen stabilisasi makro. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

3. Menjaga belanja pemerintah tetap bergerak sebagai penopang permintaan

Saluran ketiga adalah **kecepatan belanja negara**. Sampai 28 Februari 2026, belanja negara tumbuh **41,9 persen** secara tahunan, dengan belanja pemerintah pusat tumbuh **63,7 persen** dan transfer ke daerah tumbuh **8,1 persen**. Belanja K/L sendiri mencapai **Rp155,0 triliun**, sedangkan belanja barang dan belanja modal juga menunjukkan akselerasi. Dalam teori fiskal, percepatan belanja pemerintah pada masa ketidakpastian global membantu mencegah ekonomi domestik kehilangan momentum terlalu cepat. Negara pada dasarnya bertindak sebagai pembeli terakhir ketika sektor swasta cenderung menahan ekspansi.

Di level praktis, percepatan itu terlihat dalam sejumlah pos. Kemenkeu mencatat peningkatan belanja barang antara lain didorong pelaksanaan makan bergizi gratis, penyaluran dana BOS, insentif biodiesel, pelayanan kesehatan UPT, dan stabilisasi pangan. Belanja modal juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan melalui jalan, irigasi, jaringan, dan peralatan. Narasi ini penting karena menunjukkan bahwa *shock absorber* fiskal tidak hanya berbentuk “menahan harga”, tetapi juga “menjaga mesin ekonomi tetap menyala” lewat belanja produktif. Jika guncangan eksternal menahan investasi swasta atau memperburuk sentimen, percepatan belanja pemerintah dapat menutup sebagian celah tersebut. ([Kemenkeu Media](#))

4. Menjaga kredibilitas pasar melalui manajemen pembiayaan

Saluran keempat, yang sering kurang terlihat publik, adalah **kredibilitas pembiayaan**. APBN hanya efektif sebagai *shock absorber* bila pasar percaya bahwa defisit dapat dibiayai dengan biaya yang wajar. Sampai akhir Februari 2026, pemerintah menegaskan pembiayaan tetap dikelola secara prudent, dengan pertimbangan likuiditas, dinamika pasar, *active cash & debt management*, dan *cost of fund* yang efisien. Pada saat yang sama, BI mencatat yield SBN 10 tahun pada 27 Februari 2026 turun ke sekitar **6,40–6,41 persen**. Ini memberi sinyal bahwa meski global bergejolak, pasar utang domestik masih cukup menerima strategi pembiayaan pemerintah. ([Kemenkeu Media](#))

Kredibilitas ini diperkuat oleh fakta bahwa utang luar negeri pemerintah tetap didominasi utang jangka panjang, dan BI menyebut pengelolaannya cermat, terukur, dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah Januari 2026 mencapai **US\$216,3 miliar**, dengan pangsa utang jangka panjang **99,98 persen**. Ini bukan berarti tidak ada risiko, tetapi struktur jatuh tempo yang panjang memberi ruang lebih besar bagi APBN untuk bernapas saat pasar global berubah. Dalam istilah sederhana, negara tidak sekadar memiliki defisit; negara juga masih memiliki kemampuan mengelola defisit itu tanpa memicu kepanikan. ([Bank Indonesia](#))

Seberapa Kuat APBN 2026? Argumen tentang Kekuatan Nyata

Argumen pertama tentang kekuatan APBN 2026 adalah bahwa **ruang fiskalnya masih memadai**. Defisit **2,68 persen terhadap PDB** masih berada di bawah ambang 3 persen, sehingga pemerintah memiliki ruang manuver yang tidak kecil. Dibanding masa pandemi atau guncangan yang lebih ekstrem, ruang ini memang lebih sempit; tetapi untuk konteks 2026—yakni ekonomi yang masih tumbuh sekitar 5 persen dan belum masuk krisis—defisit tersebut cukup besar untuk menopang fungsi penyangga tanpa serta-merta mengirim sinyal kedisiplinan fiskal yang buruk. Dengan kata lain, APBN 2026 berada pada posisi tengah yang penting: cukup ekspansif untuk bekerja, namun belum sampai mengorbankan kredibilitas.

Argumen kedua adalah bahwa **fondasi makro yang menopang APBN masih cukup sehat**. Ekonomi 2025 tumbuh **5,11 persen**, neraca perdagangan Januari 2026 surplus **US\$0,95 miliar**, cadangan devisa akhir Februari 2026 tetap tinggi setara **6,1 bulan impor**, dan keyakinan konsumen Februari 2026 masih optimistis. Bahkan penjualan eceran Februari 2026 diperkirakan tumbuh **6,9 persen** secara tahunan. Ini penting karena APBN yang baik tetap membutuhkan ekosistem makro yang relatif stabil. Jika ekonomi sudah masuk resesi, neraca eksternal tertekan berat, dan konsumsi jatuh, maka APBN akan lebih cepat kehabisan daya. Pada

awal 2026, kondisi Indonesia belum berada pada titik tersebut. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Argumen ketiga adalah bahwa **komposisi belanja APBN 2026 cukup relevan dengan saluran transmisi guncangan**. Ketika risiko terbesar datang dari harga energi, inflasi, dan pelemahan permintaan, maka subsidi-kompensasi, bansos, dan percepatan belanja barang/jasa memang menjadi instrumen yang paling logis. Sampai Februari 2026, APBN telah mengaktifkan ketiga saluran tersebut secara bersamaan. Ini memperlihatkan bahwa APBN tidak hanya “besar”, tetapi juga relatif “tepat bentuk” untuk menghadapi guncangan yang sedang terjadi. Dalam penilaian fiskal, kecocokan instrumen sering lebih menentukan daripada semata-mata ukuran nominal belanja. ([Kemenkeu Media](#))

Argumen keempat adalah adanya **sinergi fiskal-moneter**. BI mempertahankan BI-Rate **4,75 persen** untuk menjaga stabilitas rupiah dan sasaran inflasi, sementara APBN menopang permintaan, melindungi daya beli, dan menyerap sebagian tekanan harga. Kombinasi ini penting. Jika fiskal terlalu pasif saat moneter ketat, ekonomi bisa terlalu cepat mendingin. Sebaliknya, jika fiskal terlalu longgar saat moneter sedang fokus menahan inflasi dan kurs, kredibilitas makro bisa terganggu. Sampai Maret 2026, keduanya tampak berjalan saling melengkapi: BI menjaga jangkar stabilitas, APBN menjaga bantalan permintaan dan kesejahteraan. ([Bank Indonesia](#))

Batas Kekuatan APBN 2026: Di Mana Titik Rapuhnya?

Namun, menyebut APBN 2026 “cukup kuat” tidak sama dengan menyebutnya “tanpa batas”. Kelemahan pertama terletak pada **sensitivitas tinggi terhadap harga minyak dan kurs**. Nota Keuangan dengan jelas menjelaskan bahwa kenaikan ICP menaikkan subsidi energi, sedangkan depresiasi rupiah memengaruhi bunga utang, subsidi energi, penarikan pinjaman, dan penerimaan terkait perdagangan internasional. Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa realisasi subsidi dan kompensasi

dipengaruhi fluktuasi ICP dan depresiasi rupiah. Artinya, semakin besar shock minyak dan kurs, semakin cepat APBN menyerap beban tambahan. Dalam jangka pendek ini bermanfaat, tetapi dalam jangka lebih panjang dapat menggerus ruang fiskal. ([Kemenkeu Media](#))

Kelemahan kedua adalah **biaya pembiayaan bisa meningkat** bila pasar global memburuk. Nota Keuangan menyebut perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun berdampak langsung pada pembayaran bunga utang domestik dan perubahan *cost of fund*. Pada awal 2026 memang yield SBN relatif terjaga, tetapi kondisi ini sangat dipengaruhi sentimen global. Bila eskalasi geopolitik membesar, DXY menguat, dan investor global beralih ke aset aman, maka biaya utang Indonesia dapat meningkat. Dalam situasi itu, APBN tetap bisa membiayai defisit, tetapi dengan harga yang lebih mahal. *Shock absorber* fiskal tetap bekerja, hanya saja absorber-nya sendiri menjadi lebih mahal. ([Kemenkeu Media](#))

Kelemahan ketiga adalah **ketergantungan pada kualitas targeting**. Subsidi energi dan bansos efektif hanya bila tepat sasaran. Bila subsidi bocor terlalu besar ke kelompok yang tidak membutuhkan, APBN memang mengeluarkan uang, tetapi daya serap perlindungannya terhadap kelompok rentan menjadi lebih lemah. Begitu pula bansos: secara nominal anggarannya besar, tetapi kekuatan penyangganya bergantung pada akurasi data, kecepatan penyaluran, dan kecukupan nilai bantuan terhadap inflasi biaya hidup. Karena itu, ukuran "kuat" bukan sekadar terletak pada nominal Rp51,5 triliun subsidi/kompensasi atau Rp27 triliun bansos, melainkan pada berapa besar dari nilai itu yang benar-benar sampai pada kelompok yang paling terdampak.

Kelemahan keempat adalah **sisi pendapatan negara juga tidak sepenuhnya kebal**. Nota Keuangan menjelaskan bahwa nilai tukar memengaruhi penerimaan terkait impor dan migas, sementara perubahan harga komoditas dapat mengubah penerimaan perpajakan dan PNBK. Selain itu, nota tersebut juga mencatat bahwa pendapatan negara 2025

menghadapi tekanan antara lain karena pergeseran penerimaan dividen BUMN ke BPI Danantara. Ini menunjukkan bahwa ketika belanja penyangga harus aktif, sisi pendapatan justru bisa mengalami tekanan simultan. Inilah dilema klasik *shock absorber*: ia harus bekerja lebih keras justru ketika sumber dayanya berpotensi melemah. ([Kemenkeu Media](#))

Kelemahan kelima adalah **APBN tidak bisa menggantikan reformasi struktural**. Anggaran bisa menahan dampak langsung dari guncangan, tetapi tidak bisa sendirian menyelesaikan persoalan mendasar seperti produktivitas energi, efisiensi logistik, ketergantungan migas impor, atau kelemahan basis pajak. Karena itu, APBN sebagai *shock absorber* sangat penting untuk jangka pendek, tetapi akan menjadi mahal dan tidak efisien bila dipaksa menjadi solusi permanen. Dalam hal ini, kekuatan APBN 2026 harus dibaca sebagai kapasitas stabilisasi, bukan sebagai substitusi bagi reformasi ekonomi yang lebih mendalam. ([Kemenkeu Media](#))

Ilustrasi Naratif: Ketika Guncangan Global Datang ke Dapur Rumah Tangga

Untuk melihat fungsi APBN secara lebih konkret, bayangkan sebuah rumah tangga kelas menengah bawah di kota besar pada awal 2026. Ayah bekerja di sektor jasa, ibu menjalankan usaha kecil dari rumah, dan pengeluaran bulanan mereka sensitif terhadap BBM, LPG, listrik, bahan pokok, biaya sekolah, dan transportasi. Bila harga minyak global melonjak dan rupiah melemah, tanpa bantalan fiskal tekanan itu dapat langsung datang sebagai biaya angkutan lebih tinggi, harga pangan naik, listrik menjadi lebih mahal, dan permintaan pelanggan menurun. Dalam skenario seperti ini, APBN bekerja bukan dengan cara “menghilangkan masalah”, melainkan dengan memperlambat transmisi masalah: harga-harga tertentu ditahan melalui subsidi/kompensasi, bansos menjaga dasar konsumsi kelompok rentan, dan belanja pemerintah menahan perlambatan ekonomi lebih dalam.

Bagi pelaku UMKM, mekanismenya juga serupa. Ketika energi dan biaya logistik cenderung naik, KUR bersubsidi, stabilisasi harga energi, dan

belanja pemerintah pada akhirnya ikut menentukan apakah usaha kecil masih punya napas. Data APBN Kita menunjukkan debitur KUR yang tersentuh skema subsidi mencapai **0,8 juta debitur** sampai Februari 2026. Jadi, *shock absorber* fiskal bukan hanya konsep abstrak dalam bahasa kebijakan, tetapi hadir sebagai pengurang gesekan dalam ekonomi sehari-hari: biaya yang tidak sepenuhnya naik, konsumsi yang tidak sepenuhnya jatuh, dan ekspektasi yang tidak sepenuhnya runtuh. ([Kemenkeu Media](#))

Implikasi Kebijakan: Bagaimana Memperkuat Shock Absorber APBN?

Implikasi pertama adalah perlunya **mempertegas prioritas antara belanja penyangga dan belanja jangka panjang**. Pada masa gejolak, APBN memang perlu melindungi daya beli dan menahan inflasi. Namun pelindung jangka pendek ini sebaiknya dihubungkan dengan agenda jangka panjang, misalnya subsidi energi yang makin tepat sasaran, investasi irigasi dan logistik pangan, peningkatan efisiensi energi, dan pembiayaan UMKM yang lebih produktif. Jika tidak, APBN hanya akan sibuk memadamkan api berulang tanpa mengurangi sumber panasnya. Data APBN 2026 yang juga memuat stabilisasi pangan, irigasi, dan insentif biodiesel memberi arah bahwa jalur integratif semacam ini sudah mulai dibangun, tetapi perlu diperkuat. ([Kemenkeu Media](#))

Implikasi kedua adalah penguatan **targeting subsidi dan bansos**.

Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa ruang fiskal paling cepat habis bukan karena besarnya niat melindungi, melainkan karena perlindungan yang terlalu lebar dan tidak presisi. Karena itu, APBN 2026 akan jauh lebih kuat bila subsidi energi makin diarahkan ke kelompok yang benar-benar membutuhkan, bansos cepat menyesuaikan tekanan biaya hidup, dan pembaruan data penerima dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks shock absorber, presisi sama pentingnya dengan besaran. ([Kemenkeu Media](#))

Implikasi ketiga adalah menjaga **disiplin pembiayaan**. Pemerintah sudah menegaskan penggunaan *active cash & debt management* serta perhatian

pada *cost of fund*. Prinsip ini perlu dijaga karena penyangga fiskal yang baik harus dibangun di atas pembiayaan yang juga stabil. Artinya, struktur jatuh tempo utang, diversifikasi sumber pembiayaan, pendalaman pasar SBN domestik, dan komunikasi pasar yang kredibel tetap merupakan bagian integral dari kapasitas APBN sebagai *shock absorber*. Tanpa itu, setiap perluasan fiskal akan lebih cepat dibaca sebagai ancaman.

([Kemenkeu Media](#))

Implikasi keempat adalah memperkuat **sinergi fiskal-moneter dan pusat-daerah**. Ketika BI menjaga rupiah dan inflasi, APBN perlu fokus pada bantalan daya beli dan penyangga pertumbuhan. Pada saat yang sama, transfer ke daerah harus cukup efektif agar stabilisasi tidak berhenti di pusat. Karena banyak guncangan akhirnya dirasakan di pasar tradisional, biaya transportasi lokal, dan layanan publik daerah, maka kekuatan APBN pusat hanya akan maksimal bila didukung kapasitas eksekusi pemerintah daerah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa *shock absorber* nasional sesungguhnya adalah jaringan, bukan satu instrumen tunggal.

Kesimpulan

APBN 2026 dapat dinilai **cukup kuat** sebagai *shock absorber* untuk menahan guncangan eksternal pada awal 2026, tetapi kekuatannya bersifat terbatas dan kondisional. Kekuatan itu bersandar pada postur fiskal yang masih terkelola—defisit **2,68 persen terhadap PDB**—pendapatan awal tahun yang masih tumbuh baik, belanja negara yang bergerak cepat, subsidi dan kompensasi yang aktif, bansos yang menopang konsumsi rumah tangga, serta pembiayaan yang sampai Februari 2026 masih dinyatakan prudent dan *on-track*. Kekuatan tersebut juga ditopang oleh ekonomi domestik yang belum memasuki krisis: pertumbuhan 2025 **5,11 persen**, surplus perdagangan Januari 2026 **US\$0,95 miliar**, serta cadangan devisa yang masih tinggi.

Namun, APBN 2026 bukan tameng tanpa celah. Ia tetap rentan terhadap lonjakan ICP, depresiasi rupiah, kenaikan biaya bunga utang, tekanan pada

penerimaan negara, dan masalah ketepatan sasaran belanja. Karena itu, jawaban atas pertanyaan "seberapa kuat menahan guncangan eksternal?" adalah: **kuat untuk meredam dan membeli waktu, tetapi tidak cukup bila dipaksa menanggung shock besar berkepanjangan tanpa dukungan reformasi struktural.** APBN 2026 efektif sebagai jembatan stabilisasi; tetapi agar jembatan itu tidak terus dibebani berulang, Indonesia tetap perlu memperkuat ketahanan energi, basis penerimaan, produktivitas, dan efisiensi belanja. Dengan kata lain, APBN dapat menyerap benturan, tetapi masa depan ketahanan ekonomi tetap ditentukan oleh seberapa cepat negara mengurangi sumber benturan itu sendiri. ([Kemenkeu Media](#))

Glosarium

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui DPR.

Shock absorber

Instrumen atau mekanisme yang berfungsi menyerap dan meredam dampak guncangan agar tidak langsung menimbulkan kerusakan ekonomi yang lebih besar.

Defisit anggaran

Kondisi ketika total belanja negara melebihi total pendapatan negara dalam satu tahun anggaran.

Pembiayaan anggaran

Sumber pendanaan untuk menutup defisit APBN, baik melalui utang maupun pembiayaan nonutang.

Subsidi

Belanja pemerintah untuk menurunkan biaya atau harga barang/jasa tertentu agar tetap terjangkau bagi masyarakat atau sektor prioritas.

Kompensasi

Pembayaran pemerintah untuk menutup selisih biaya atau harga tertentu agar tarif domestik tidak langsung mencerminkan lonjakan biaya pasar.

Bansos

Bantuan sosial, yaitu transfer pemerintah kepada rumah tangga atau kelompok rentan untuk menjaga perlindungan sosial.

ICP (Indonesian Crude Price)

Harga minyak mentah Indonesia yang digunakan sebagai salah satu asumsi penting dalam penyusunan APBN.

Cost of fund

Biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk memperoleh pembiayaan, terutama dari penerbitan utang.

Countercyclical fiscal policy

Kebijakan fiskal yang diarahkan untuk melawan siklus ekonomi, misalnya dengan memperbesar dukungan saat ekonomi melemah.

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026a). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026b). *Ekspor dan impor Indonesia Januari 2026 masing-masing tercatat USD 22,16 miliar dan USD 21,20 miliar*. Badan Pusat Statistik.

Rudy C Tarumingkeng: APBN 2026 sebagai Shock Absorber: Seberapa Kuat Menahan Guncangan Eksternal

Bank Indonesia. (2026a). *BI-Rate tetap 4,75%: Mendorong pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026b). *BI-Rate tetap 4,75%: Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026c). *Cadangan devisa Februari 2026 tetap tinggi*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026d). *Survei Konsumen Februari 2026: Keyakinan konsumen tetap kuat*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026e). *Survei Penjualan Eceran Februari 2026: Penjualan eceran diperkirakan meningkat*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026f). *Utang luar negeri Indonesia Januari 2026 tetap terjaga*. Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026a). *APBN Kita Februari 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026b). *Newsletter APBN Kita Februari 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 1 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69ccaabe-5698-839f-b0a3-4c1460747946>